



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KABUL KARYADI**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**
3. NHK : **922976**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.130.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 690 m2/200 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 3.520 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, Rp. 505.000.000
3. Tanah Seluas 3.620 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, Rp. 505.000.000
4. Tanah Seluas 784 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 1.863 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m2/100 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah Seluas 1.116 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 130.000.000**

1. MOBIL, ISUZU PANTHER/MINI BUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.615.506
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.274.115.506
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.274.115.506

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.